

**TANTANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA  
DALAM MENGHADAPI VERIFIKASI KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

**Zia Ul Haq, Ubaidullah**

**( zia.vasca@gmail.com , ubaidullah@unsyiah.ac.id)**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

**ABSTRAK**

Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Kemenkumham) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik merupakan salah satu syarat berdirinya partai politik baru. Verifikasi tersebut akan melihat kelengkapan partai politik baru yakni secara struktural 100% di tingkat pusat dan Provinsi, 75% untuk tingkat Kabupaten/Kota dan 50% untuk Kecamatan. Kemudian juga kelengkapan syarat administrasi seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) kantor untuk tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, kemudian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Banda Aceh adalah salah satu kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang telah melalui verifikasi sesuai aturan Kemenkumham. Tidak hanya persoalan tahapan verifikasi, DPD PSI Kota Banda Aceh sebagai partai politik baru di Aceh juga harus dihadapkan oleh kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh. Kekhususan Provinsi Aceh telah melahirkan partai politik lokal (parlok) yang akan menjadi pesaing DPD PSI Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala internal maupun eksternal yang dihadapi DPD PSI Kota Banda Aceh sebagai partai politik baru terkait pemenuhan syarat atau aturan yang telah di tetapkan Kemenkumham. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang datang dari internal maupun eksternal yang dihadapi oleh DPD PSI Kota Banda Aceh ketika

memenuhi segala aturan dari Kemenkumham telah berhasil dihadapi. Keberhasilan verifikasi tersebut dilakukan melalui kebijakan yang menjadi keputusan bersama, sehingga DPD PSI Kota Banda Aceh telah mampu menyelesaikan proses verifikasi Kemenkumham.

**Kata Kunci** : Partai Politik, Kemenkumham, Strategi Politik, Banda Aceh

### **ABSTRACT**

The regulation of the Minister of Law and Human Rights (Kemenkumham) Number 37 Year 2015 on Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik is one of the requirements of the establishment of new political parties. The verification will examine the completeness of the new political party that is 100% structurally at the central and provincial level, 75% for the district / municipal level and 50% for the sub-district level. Then it will also be considered the completeness of administrative requirements such as Keterangan Domisili (SKD) for the office at the level of Province, District / Municipality and Sub-District, the Surat Keterangan Terdaftar (SKT) for the level of Province and District / City. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) of the Partai Solidaritas Indonesia branch Kota Banda Aceh is one of the district / municipality stewardship that has been verified by the Kemenkumham. Not only the question of verification stage, the DPD PSI Kota Banda Aceh as a new political party in Aceh must also be confronted by the specificity of Aceh Province. The specificity of Aceh Province has allowed to the establishment of local political party (parlok) that will become main competitors of DPD PSI Kota Banda Aceh. This study aims to determine what were the factors that became the internal and external constraints faced by the DPD PSI Banda Aceh as a new political party in the fulfillment of requirements or conditions set by the Kemenkumham. The research used a qualitative research method with descriptive approach. Data collected through primary and secondary sources; primary data were obtained through field research by conducting interviews to informant. While the secondary data were obtained through literature research from documents, books and related readings. The results of this research show that the internal and external challenges experienced by DPD PSI Kota Banda Aceh when fulfilling all the requirements of

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Kemenkumham is a process that the party must face. Through joint decision policies, DPD PSI Kota Banda Aceh has been able to complete all verification processes of Kemenkumham.

**Keywords:** Political Party, Kemenkumham, Strategy Politics, Banda Aceh

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik baru di Indonesia yang membawa identitas kebijakan dan keragaman dengan berpijak pada kesadaran bahwa politik sejatinya adalah hal yang baik. PSI adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita (*news anchor*) Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara berusia muda (ditandai dengan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk) untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial berbagai *platform* semisal *Twitter* dan *Facebook* secara aktif untuk mengkampanyekan dan mengajak warga muda berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015. Mereka membawa *platform* tentang solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa. Tokoh-tokoh partai akan diisi dengan anak muda dan tidak ingin adanya "bekas" politisi partai lain yang memasuki partai ini. Ada aturan bahwa pengurus partai dibatasi maksimal 45 tahun, dan saat ini pengurus daerah rata-rata berumur 20-30 tahun. Selain itu Partai ini tidak mau bertumpu kepada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai, seperti partai politik lain kebanyakan. Partai ini juga mengklaim transparansi sumbangan finansial, khususnya memisahkan pengaruh bisnis dari operasional partai.

---

Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

PSI kemudian mendaftarkan partainya untuk menjadi salah satu partai politik baru untuk bisa ikut didalam kontestasi politik di Indonesia. Sebagai partai politik baru, PSI harus mengikuti tahapan aturan yang telah ditetapkan melalui aturan yang ada. Salah satunya Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Kemenkumham) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Administrasi dan Faktual selama 45 hari Kerja, verifikasi tahap I (Administrasi), dilaksanakan tanggal 1 – 15 Agustus 2016 dengan memeriksa dan meneliti persyaratan yang dilampirkan secara administrasi dan substansi, seperti: Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/kota, dan Kecamatan; Surat Keterangan Domisili (SKD), surat keterangan domisili partai yang disertai bukti sah status kantor partai tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; Surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotocopy KTP. Kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Tahap II (Faktual) dengan memeriksa secara langsung terhadap keabsahan dokumen persyaratan yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus-23 September 2016. (Kompas, 2017)

PSI telah mempersiapkan segala hal untuk memenuhi persyaratan pendirian partai politik baru yang sesuai dengan undang-undang tentang partai politik baru, terutama terkait persyaratan untuk kelolosan verifikasi dengan kelengkapan struktural 100% di tingkat Pusat dan Provinsi, 75% untuk tingkat Kabupaten/Kota dan 50% untuk tingkat Kecamatan. Sebagaimana observasi awal dari keterangan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Banda Aceh, Alhadi Habibi menjelaskan bahwa persyaratan tersebut terkait struktural dan kelengkapan syarat administrasi seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sudah dipenuhi serta kepengurusan partai di Banda Aceh sudah terbentuk sampai ke tingkat Kecamatan (wawancara ketua DPD PSI Banda Aceh 5 Desember 2016).

Tantangan dan strategi DPD PSI Banda Aceh tentu harus menyikapi konteks partai politik yang di Aceh, khususnya Banda Aceh yang menjadi sentra pertarungan wacana, gagasan, dan tindakan politik di provinsi Aceh. Ditambah lagi setelah pasca konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia yang berakhir damai tahun 2005, telah melahirkan kekhususan provinsi Aceh untuk memilik partai politik lokal (Parlok), hal ini turut menambah kompetisi politik di Aceh yang semakin menantang kedepannya. Tentu dengan hadirnya Parlok di

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Aceh, hal ini merupakan salah satu tantangan DPD PSI Kota Banda Aceh untuk merekrut pengurusnya guna melengkapi kepengurusan partai.

Kota Banda Aceh yang merupakan pusat sosial, budaya, dan politik di Aceh tentu saja memiliki demografi pemilihnya sendiri. Belum lagi konstruksi sosial politik yang telah terbangun di Aceh yang dimana masyarakatnya sangat mengedepankan nilai-nilai peradaban islam. Namun faktanya adalah Ketua Umum DPP PSI merupakan seorang perempuan dan juga tidak beragama islam, hal ini merupakan salah satu faktor yang bertentangan dari nilai-nilai keislaman yang telah lama terkonstruksi pada budaya politik di Aceh.

Hal lainnya adalah terkait PSI yang merupakan salah satu partai politik yang mendukung pencalonan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, yang dimana persoalan ini menjadi isu yang sensitif di tengah masyarakat Aceh. Belum lagi pernyataan salah satu media elektronik di Aceh yang pernah memuat berita terkait PSI yaitu, PSI dikenal sebagai partai politik baru yang mendukung terpidana kasus penistaan agama, Ahok saat pilkada DKI Jakarta lalu. Bahkan Sekretaris Jendral PSI, masuk ke dalam timses Ahok sebagai juru bicara (Harianmerdeka, 2018). Tentunya hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui DPD PSI Kota Banda Aceh guna mendapat tempat pada kontestasi politik di Kota Banda Aceh nantinya.

DPD PSI Kota Banda Aceh dipilih sebagai representasi objek kajian untuk melihat kendala dan tantangan yang dihadapi ketika mengikuti proses verifikasi yang telah diatur pada peraturan Kemenkumham. Setelah DPD PSI Kota Banda Aceh berhasil lolos pada tahap verifikasi Kemenkumham, DPD PSI Kota Banda Aceh kemudian dituntut untuk menunjukkan eksistensinya sebagai partai politik pendatang baru yang mewarnai kancah perpolitikan di Kota Banda Aceh. Melihat kesuksesan yang telah dicapai DPD PSI Kota Banda Aceh tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kendala internal dan eksternal DPD PSI Kota Banda Aceh sebagai partai politik baru yang ada di Kota Banda Aceh.

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

---

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teoritis

Kerangka teori bersumber dari literatur karya ilmiah disebut juga sebagai tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau landasan konseptual. Dengan berdasarkan teori yang peneliti gunakan maka akan mempermudah untuk memecahkan masalah yang peneliti kaji, serta akan terlihat kerangka pemikiran atau alur pikir. Untuk mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori Partai Politik dan Demokrasi.

### Teori Partai Politik

Partai Politik (parpol) merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (Budiarjo, 2008: 403).

Carl J. Friedrich menjelaskan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil (Budiarjo, 2008: 404).

### Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena (Azra, 2005: 125).

### Strategi Politik

Strategi adalah cara atau taktik. Strategi politik merupakan teknik dan cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Strategi

---

Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

politik yang dijalankan setiap partai politik tentunya berbeda-beda, seperti misalnya mempengaruhi, merekrut lalu mendoktrin individu-individu yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencapai kemenangan. Kemenangan merupakan menjadi tujuan dan fokus utama dari partai politik untuk meraih dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan umum agar bisa menempatkan wakil-wakil yang di ajukan oleh setiap partai politik (Schroder, 2003: 4).

### **Strategi Isu Politik**

Perlu terus menerus memonitoring cara pesaing dalam membangun isu politik mereka. Sebab itu politik akan menentukan posisi pesaing, untuk itu perlu dicari isu-isu politik yang belum dieksploitasi oleh pihak lain. Sesuatu yang asli dari suatu partai politik kelak akan terekam dalam benak masyarakat sebagai bagian identitas dan karakteristik partai atau kandidat tersebut. Strategi politik menjadi penting artinya karena akan berkaitan dengan pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh (Schroder, 2003: 122).

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh pada bulan Mei – April 2018.

### **Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang akan dikumpulkan adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan. Data tersebut akan ditampilkan secara deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002: 3).

### **Informan Penelitian**

Subjek dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan informan. Informan adalah orang-orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, adalah:

1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah PSI Kota Banda Aceh.
2. Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Daerah PSI Kota Banda Aceh.
3. Kader PSI sebanyak 4 orang.
4. Kasubbag Hukum KIP Kota Banda Aceh.

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

5. Pengamat Politik Aceh/Akademis sebanyak 2 orang.
6. Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Aceh.

Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. *Purposive sampling* bisa juga berarti sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, *purposive sampling* mungkin adalah satu-satunya pilihan.

### **Sumber Data**

Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder. Data primer ini didapatkan secara langsung dari informan dengan melakukan wawancara dan menjadi informasi yang utama dalam penelitian ini. Sementara itu data sekunder yaitu data yang didapat baik dari buku, jurnal, koran, serta data-data media massa yang terpublikasi secara luas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi dan kepustakaan**

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skunder sebagai pelengkap data primer dengan cara mengambil gambar atau menyalin ulang informasi yang diperoleh. Pengambilan gambar akan dilakukan dengan camera digital. Sedangkan tinjauan kepustakaan adalah mempelajari dan menganalisis buku, jurnal, dokumen, arsip atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Teknik tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung, baik secara lisan maupun tatap muka dengan informan. Dalam penelitian kualitatif digunakan pedoman wawancara mendalam yang berarti pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tetapi daftar tanyaannya tidak mengikuti jalannya wawancara. Daftar wawancara digunakan agar arah wawancara tetap terkendali dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian.

---

Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:



### **Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan menemukan serta menyusun transkrip wawancara maupun observasi kepustakaan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti. Dengan cara ini, diharapkan peneliti dapat menemukan pemahaman tentang data yang tepat dan memungkinkan menyajikan data tersebut secara sistematis guna menginterpretasikan dan menarik kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Tantangan Internal DPD PSI Kota Banda Aceh Dalam Menghadapi Verifikasi Kemenkumham**

Sebagai partai politik baru yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Kemenkumham, DPD PSI Kota Banda Aceh menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Melalui surat dari KIP Kota Banda Aceh dengan Nomor : 086/PL.01.1-BA/02/KIP-Kot/II/2018 dinyatakan bahwa DPD PSI Kota Banda Aceh memenuhi segala syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dengan telah dinyatakan lulusnya DPD PSI Kota Banda Aceh, terdapat banyak rintangan yang telah dilalui yang pada akhirnya dinyatakan lulus oleh KIP Kota Banda Aceh.

Sebagai partai politik baru tentu saja harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mengenalannya kepada masyarakat dan menyampaikan visi dan misi yang ingin dicapai oleh PSI kedepan jika telah memenangkan Pemilu nantinya. Visi dan misi PSI secara tertulis ada di AD/ART PSI, kemudian PSI sebagai partai politik baru menamakannya bukan visi dan misi tetapi lebih kepada DNA trilogi perjuangan PSI, yaitu menebar kebajikan, merawat keragaman, dan mengukuhkan solidaritas. Didalam visi dan misinya secara tersirat PSI ingin menjadi kendaraan politik bagi siapa saja pemimpin diseluruh Indonesia yang bukan berasal dari darah biru atau pemilik partai, tetapi PSI ini adalah kendaraan bagi mereka yang berkapabilitas dan memiliki integritas yang baik.

Tentunya sebagai partai baru yang digerakkan oleh anak-anak muda, kendala yang pertama dihadapi adalah komitmen para pengurus terhadap PSI sendiri. Hal ini yang terjadi pada DPD PSI Kota Banda Aceh. Mereka tidak hanya dituntut untuk melewati proses verifikasi, namun juga dituntut untuk eksis sebagai partai politik. Tentu untuk kemudian mengikuti seluruh proses tahapan verifikasi dan mengembangkan

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

eksistensi PSI di publik sebagai partai, kader PSI juga dituntut untuk loyal dan solid terhadap partai. Tetap memegang teguh pada komitmen awal ketika bergabung ke dalam partai dan ingin membesarkan partai bersama-sama.

### **DPD PSI Kota Banda Aceh**

Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 yang berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik ini kemudian yang menjadi “tugas suci” pengurus PSI di semua level kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Banda Aceh merupakan salah satu kepengurusan PSI di level Kabupaten/Kota tepatnya di Kota Banda Aceh. Surat Keputusan Nomor: 384/SK/DPP/2015 DPD PSI Kota Banda Aceh sampai sekarang di Ketuai oleh Alhadi Habibi, Wakil Ketua Zarial Akbar, Sekretaris Rudi Ramadhani, Wakil Sekretaris Nazirah, dan Bendahara Awwaliyah. Sekretariat DPD PSI Kota Banda Aceh beralamat di Jln. T. Nyak Arief, No. A 15 Lamnyong, Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

### **Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik**

Tata cara pendaftaran dan pendirian badan hukum kepengurusan Partai Politik di Indonesia telah disusun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

Kendala-kendala kecil telah dilewati PSI Kota Banda Aceh dalam proses verifikasi, namun kendala tersebut tidak menjadikan persoalan sehingga mereka dinyatakan lolos verifikasi oleh KIP Kota Banda Aceh. Melalui surat dari KIP Kota Banda Aceh dengan Nomor: 086/PL.01.1-BA/02/KIP-Kot/II/2018 dinyatakan bahwa DPD PSI Kota Banda Aceh telah

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

memenuhi segala syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang. DPD PSI Kota Banda Aceh telah menyelesaikan apa yang menjadi perintah Undang-Undang, baik secara administrasi kelembagaan maupun secara keanggotaan partai politik.

### **Tantangan Eksternal DPD PSI Kota Banda Aceh Dalam Menghadapi Verifikasi Kemenkumham**

Dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan realitas kondisi politik kontemporer, DPD PSI Kota Banda Aceh lebih memfokuskan kerja-kerja politiknya. Sasaran mereka adalah generasi milenial yang tidak lagi percaya akan keterlibatan kaum tua dalam politik. Tentunya hal ini dibarengi dengan pendidikan politik bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang menerima otonomi khusus, dan sudah saatnya kita sebagai masyarakat Aceh berpegang teguh pada kebudayaan dan peradaban di Aceh. Mengenai isu keagamaan, PSI sepakat untuk mengikut aturan hukum yang ada.

Sebagai partai politik, kader-kadernya harus mampu membaca dan memahami Undang-Undang dengan baik. Apa lagi yang PSI kedepankan adalah terkait proses demokratisasi, maka dari itu kader-kadernya harus mampu memahami sistem demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia.

### **DPD PSI Kota Banda Aceh Dalam Menghadapi Verifikasi Kemenkumham**

Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil lolos setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menkumham No. 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

Strategi utama yang digunakan oleh DPD PSI Kota Banda Aceh adalah dengan cara membuka informasi satu pintu melalui media sosial. Strategi ini dianggap efektif dikarenakan memang selain tidak banyak menghabiskan budget, yang menjadi target kepengurusan juga adalah generasi milenial yang melek terhadap media sosial. Komunikasi politik yang dibangun melalui media sosial oleh DPD PSI Kota Banda Aceh bisa dikatakan berhasil, karena memang banyak peminat yang ingin bergabung bahkan mendaftarkan dirinya melalui medsos PSI Kota Banda Aceh seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain.

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Strategi komunikasi politik seperti ini adalah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Firmanzah yaitu Komunikasi intensif yang dilakukan oleh kandidat maupun partai menandakan agresivitas pesaing dalam menanamkan suatu kesan tertentu dalam benak masyarakat. Melalui pola komunikasi politik yang intensif di media sosial, DPD PSI Kota Banda Aceh berhasil merekrut anggota dan mengisi kepengurusan guna melalui proses verifikasi Kemenkumham. Pola komunikasi satu pintu di ranah media sosial menjadi target utama DPD PSI Kota Banda Aceh dalam merekrut generasi milenial.

### **Tantangan Internal dan Eksternal DPD PSI Kota Banda Aceh Dalam Menghadapi Proses Verifikasi**

Kemenkumham telah memiliki peraturan baku yang harus diikuti oleh semua partai yang ingin mendaftarkan partainya ke badan hukum. Yang pertama itu harus memiliki cabang 100% diseluruh provinsi di Indonesia, 75% di kabupaten/kota, 50% di kecamatan. Strategi yang dilakukan PSI adalah selain kepengurusan di tiap daerah juga merampingkan struktur agar kemudian mengefektifkan kehadiran pengurus ketika menghadapi verifikasi. Ketika perwakilan Kemenkumham datang ke kantor setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, PSI siap menghadirkan semua pengurus pada waktu yang telah ditetapkan. Strategi ini turunan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI dan sampai hari ini juga bahwa struktur pengurus-pengurus PSI itu sangat ramping. Ditingkat DPC hanya 3 orang, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Di tingkat DPD itu hanya 5 orang, ditingkat DPW hanya 7 orang, dan di tingkat DPP hanya 9 orang. Jadi ini dianggap akan mempermudah PSI ketika menghadapi verifikasi, lebih efisien dan efektif karena PSI tidak akan repot nantinya.

Kemudian dari segala proses DPD PSI harus berhadapan dengan sistem birokrasi daerah Kota Banda Aceh yang cenderung melamban. Kepengurusan tingkat Kecamatan atau DPC setiap kecamatan harus menyertai Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Terkait proses dalam mendapatkan surat tersebutlah kader PSI tingkat Kecamatan mendapat hambatan karena memang harus mendapatkannya di kantor Keuchik setempat. Namun dengan kesabaran dan terkadang juga pengurus DPD PSI Kota Banda Aceh harus turun ke tingkatan gampong guna mendapatkan SKD tersebut. Hal ini menjadi

---

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

kendala karena memang kepengurusan birokrasi yang agak cenderung melambatkan. Namun semua proses ini dilalui dengan baik oleh DPD PSI Kota Banda Aceh.

Kemudian kendala eksternal yang dihadapi DPD PSI Kota Banda Aceh adalah terkait isu sara. Hal ini mampu dilunakkan oleh kepengurusan atau kader PSI baik tingkat kecamatan maupun pengurus tingkat Kota/Kabupaten. Pasalnya daerah Aceh merupakan daerah khusus, maka dengan adanya aturan Undang-Undang kekhususan Aceh dijadikan sebagai komoditi politik dari pengurus DPD PSI Kota Banda Aceh. Mereka beranggapan menjadi politisi tidaklah mungkin kemudian bekerja dengan melangkahi aturan Undang-Undang yang ada, kekhususan Aceh misalnya.

Strategi komunikasi ini digunakan oleh kader-kader PSI guna merekrut keanggotaan untuk melengkapi kepengurusan baik untuk kebutuhan tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten/Kota. Mereka menjadikan kelemahan tersebut sebagai kekuatan untuk kemudian mendapatkan hati para anak muda guna meloloskan proses verifikasi, tak hanya meloloskan mereka juga mengajak muda-mudi progresif Kota Banda Aceh agar berani mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan menggunakan kendaraan Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu tahun 2019 nantinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Affan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Azyumardi Azra. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Ahmad Farhan Hamid. 2009. *Partai Politik Lokal di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta, Kemitraan

---

Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja. 1978. *Pengantar ke Arah Sistem pemerintah Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hafied Cangara. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Maurice Duverger. 1994. *Partai Politik dan Kelompok Penekan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung : Revita Aditama
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Pamudji. 1981. *Teori Sistem dan Penerapannya dalam Management*, Jakarta Ichtar Baru-van Hoeve
- Peter Schroder. 2003. *Strategi Politik*. Jakarta: Friderich Naumun Stifung
- Prajudi Atmosudirjo. 1973. *Dasar-dasar Office Management*. Jakarta: Ghalia
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Samuel Huntington. 1991. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo
- Sri Soemantri. 1976. *Sistem-sistem pemerintahan negara-negara*, Bandung: Tarsito
- 

**Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)**

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Zakaria Bangun. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan : Bina Media Perintis

Khairunnisa Lubis. 2014. Eksistensi Partai Golkar dalam Politik Lokal : Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Simalungun Tahun 2004-2009. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Zico Furqon. 2014. Eksistensi Partai Politik Lokal di Propinsi Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Undang- Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum

UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Dasar 1945

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/07/20181781/ini.alasan.kemenkumham.hanya.loloskan.psi.dalam.seleksi.badan.hukum>

<http://harianmerdeka.com/partai-psi-dibully-warga-aceh-ada-apa>

---

Tantangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Menghadapi Verifikasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus DPD PSI Kota Banda Aceh)

(Zia Ul Haq, Ubaidullah)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018: